



► PENATAAN PASAR KEMBANG

PKL Tuntut Kompensasi Rp2 Miliar

JOGJA—Sidang gugatan pedagang kaki lima (PKL) Pasar Kembang terhadap PT KAI dan Pemkot Jogja kembali dilanjutkan. Sidang berlanjut dengan proses mediasi yang ternyata juga tak menemukan titik terang lantaran Direktur PT KAI dan pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tidak hadir.

Satsabilla Annisa Azmi dan Abdul Hamid Razak
redaksi@harianjogja.com

Kuasa hukum pedagang Pasar Kembang yang tergusur, Yogi Zul Fadhlil mengatakan proses mediasi berlangsung alot. Hal tersebut karena harapan pedagang soal hadirnya direktur PT KAI dan pihak

- Proses mediasi yang dilakukan PN Jogja berjalan alot.
- Lantaran gagal, mediasi selanjutnya akan digelar pada Kamis (12/4) mendatang.

rugi dari 26 kios tergusur. Rerata, kerugian pedagang selama sembilan bulan pembiasaan mencapai Rp2 miliar. Kerugian terbesar, kata dia, bisa mencapai Rp6 miliar.

Dalam agenda mediasi pekan depan, pedagang tetap menuntut ganti rugi dan relokasi tempat usaha. "Semoga semua pihak bisa hadir. Sudah sembilan bulan dibiarkan," kata Yogi.

Sayangnya, kuasa hukum dari PT KAI dan Pemkot Jogja enggan menyebutkan nama serta memberi komentar apapun terkait dengan hasil mediasi yang nihil tersebut.

Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tidak terpenuhi. "Mediasi ditunda karena Direktur PT KAI tidak hadir, pedagang sebenarnya mengharapkan kehadiran pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pihak yang memberi kekancingan kepada PT KAI, tapi mereka juga tidak datang," kata Yogi saat ditemui di sela-sela aksi demo yang digelar belasan PKL di Pengadilan Negeri (PN) Jogja, Kamis (5/4).

Yogi mengatakan mediasi akan dilanjutkan Kamis, (12/4). Harapannya Direktur PT KAI dan pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat selain kuasa hukumnya juga hadir dalam proses mediasi.

Yogi lantas menunjukkan daftar ganti

Sekretaris Paguyuban PKL Pasar Kembang Eriyon Sikumbang mengatakan pedagang menuntut proses pengurusan yang dirasa janggal. Kendati tahu tanah itu bukan milik mereka, para pedagang berharap diajak berunding terlebih dulu sebelum dipindahkan.

"Namun sebelum pengurusan kami tidak pernah diajak berunding oleh Pemkot Jogja. Kami menuntut kompensasi kerugian sebesar Rp2 miliar per pedagang dan tentunya relokasi," kata Eriyon.

Langkah selanjutnya, dia akan menagih janji DPRD Kota Jogja untuk membantu para pedagang. Rencananya, dia dan massa PKL akan beraudiensi dengan legislator pada 11 April.

LINI MASA POLEMIK PKL PASAR KEMBANG

MEI 2016

- Pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Stasiun Tugu dan Pasar Kembang menolak rencana pengurusan yang dilakukan oleh Pemkot dan PT KAI.

JULI 2017

- PKL Pasar Kembang akhirnya digusur oleh Pemkot dengan menggunakan Peraturan Wali Kota Jogja No.51/2017 tentang Penghapusan Pasar Golongan IV atau Pasar Tradisional.
- PT KAI memutuskan enggan memberi kompensasi dan relokasi PKL Pasar Kembang yang digusur.

JANUARI 2018

- PKL Pasar Kembang menggugat PT

KAI dan Pemkot Jogja ke pengadilan atas pengurusan tersebut sejumlah total mencapai Rp101,2 miliar.

MARET 2018

- Sidang pertama guguan pedagang Pasar Kembang korban pengurusan PT KAI di Pengadilan Negeri Jogja. Akan tetapi dalam sidang itu PT KAI tidak hadir.

APRIL 2018

- Mediasi yang digelar di PN gagal. Dalam mediasi ini, kuasa hukum baik dari PT KAI maupun Keraton tidak hadir. Akhirnya mediasi pun ditunda pada pekan selanjutnya.

Diolah dari berbagai sumber



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005